

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Ridha Nur Fitriah

NPP. 32.0769

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: ridhanf2003@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ayu Widowati Johannes, S,STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Author focuses on the problem The Performance Accountability System Assessment of the Banjarmasin City Government is still categorized as Very Good (BB), even though regional financial management has resulted in high-quality financial reporting, as evidenced by an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) Representative Office of South Kalimantan Province for eleven consecutive years.

Purpose: This study aims to determine the accountability of regional financial management through the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at BPKPAD Banjarmasin City. **Method:** This research is a qualitative study using a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews with nine informants working at BPKPAD Banjarmasin City, as well as observation and documentation at the BPKPAD office. **Result:** The result show that the use of SIPD has supported the realization of accountability in regional financial management, as reflected in the fulfillment of the dimensions of honesty and legal accountability, evidenced by the implementation of the civil servant code of ethics and performance agreements; process accountability, evidenced by the SIA and SIM in SIPD which ensure more orderly administrative procedures and ensure that the budget is used appropriately, as well as improving the quality of public services that are responsive and low-cost for the community; program accountability, evidenced by budgets that align with regional planning priorities and programs designed for optimal results with minimal costs; and policy accountability, evidenced by the use of SIPD that applies three policies by prioritizing community needs.. **Conclusion:** Accountability in regional financial management through SIPD in the City of Banjarmasin has been achieved.

Keywords: Accountability; Regional Financial Management; SIPD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang masih berada dalam kategori sangat baik (BB) padahal Pengelolaan keuangan daerah telah menghasilkan pembentukan kualitas informasi dalam laporan keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa

Keuangan perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama sebelas kali berturut-turut. **Tujuan:** untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKPAD Kota Banjarmasin. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara dengan sembilan informan yang bekerja di BPKPAD Kota Banjarmasin, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh yaitu penggunaan SIPD telah mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tercermin dari terpenuhinya dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum yang dibuktikan dengan penerapan kode etik PNS dan perjanjian kinerja, akuntabilitas proses dibuktikan dengan SIA, SIM dalam SIPD yang memastikan prosedur administrasi lebih tertib dan memastikan anggaran digunakan tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan rendah biaya terhadap masyarakat, akuntabilitas program dibuktikan oleh anggaran yang sesuai prioritas perencanaan daerah dan program disusun untuk hasil optimal dengan biaya minimal, serta akuntabilitas kebijakan dibuktikan oleh penggunaan SIPD yang menerapkan tiga kebijakan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. **Kesimpulan:** Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di BPKPAD Kota Banjarmasin telah tercapai.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era reformasi kini memberikan peluang untuk perubahan dalam paradigma pembangunan nasional khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Yuesti, Adnyana, dan Pramesti 2022). Seiring perkembangan zaman, kehadiran teknologi menjadi jawaban dari tantangan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dalam memanfaatkan teknologi dan berinovasi mengembangkan aplikasi penyokong pengelolaan keuangan di Indonesia. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang dapat disebut juga sebagai *e-government* ialah bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diimplementasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang wajib dimiliki oleh seluruh pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari inovasi yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat guna membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah khususnya tahap perencanaan anggaran daerah (Tumija dan Erlambang 2023).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Jatmiko et al. 2020). Kemudian, SAP yang baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Sinurat, M., Dkk 2024). Pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

(BPKPAD) Kota Banjarmasin telah menghasilkan pembentukan kualitas informasi dalam laporan keuangan yang mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana yang telah disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), hal tersebut ditandai dengan sudah dapat ditingkatkan dan dipertahankannya opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama sebelas kali berturut-turut yang merupakan hasil akhir dalam sistem tersebut. Meskipun demikian, penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin masih berada dalam kategori sangat baik (BB). Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diterapkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKPAD Kota Banjarmasin.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang berkaitan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di BPKPAD Kota Banjarmasin. SIPD sendiri merupakan aplikasi terintegrasi yang dirancang untuk menjadi instrumen utama dalam digitalisasi dan standarisasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya juga terdapat berbagai kendala belum berfungsi secara optimal akibat frekuensi error sistem dan gangguan teknis, yang justru dapat menghambat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penanganan lambat oleh Helpdesk SIPD Kemendagri memperburuk kondisi ini, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam. Selain itu, belum ada kajian yang menyoroti kurangnya kedisiplinan dari SKPD dalam melaporkan pergeseran anggaran, yang juga berdampak pada lambatnya proses penyesuaian dan penyaluran anggaran. Fenomena ini menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi rendahnya akuntabilitas kebijakan dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dengan mengeksplorasi bagaimana BPKPAD Kota Banjarmasin mengelola hambatan-hambatan internal dan eksternal tersebut, serta upaya strategis yang dilakukan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap dapat terwujud melalui pemanfaatan SIPD secara lebih maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maupun pengaruh SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Evada Dewata, Hadi Jauhari, Misfi El Auda berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Dewata, Jauhari, El Auda 2021), menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kualitas laporan keuangan. Penelitian Yurika Aulia, Dkk yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Deli Serdang menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan (Aulia, dkk 2024). Penelitian Febriana Nafi'ah Vidyasari, Bambang Suryono dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Vidyasari, Suryono 2021). Penelitian Luqyana dan Islahuddin yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Apakah Aksesibilitas, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur Mempengaruhinya menemukan bahwa Aksesibilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Luqyana dan Islahuddin 2022). Berdasarkan hasil penelitian Tumija, Asep Hendra, dan Marja Sinurat yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menemukan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang mengalami beberapa kendala seperti saat penginputan data sering *error* karena *server* yang tidak kuat (Tumija et al., 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini meneliti bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD, sedangkan penelitian lainnya seperti penelitian Evada Dewata, dkk (Dewata, Jauhari, El Auda 2021) berfokus pada pengaruh faktor-faktor tertentu dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan, penelitian Febriana (Vidyasari, Suryono 2021) yang meneliti pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, dan penelitian Tumija (Tumija et al., 2023) bagaimana penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah beserta hambatan-hambatan pada pengaplikasiannya. Penelitian ini juga meneliti SIPD sebagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai keunggulan dari sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya karena aplikasi terus-menerus dikembangkan serta diperbarui. Penelitian sebelumnya yakni oleh Yurika (Aulia, dkk 2024) tidak mengkaji SIPD, melainkan hanya meneliti sisi akuntabilitas, sehingga penulis mengkolaborasikan dua konsep yaitu konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan konsep SIPD.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKPAD Kota Banjarmasin.

II. METODE

Pendekatan penelitian dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Nurdin, I., & Hartati 2019), metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode *naturalistik* karena dilakukan dalam kondisi yang alami (*natural setting*); juga dikenal sebagai metode etnografi, karena awalnya lebih banyak digunakan dalam penelitian antropologi budaya; dan disebut sebagai metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dikaji dengan pendekatan induktif yang dilakukan penulis di lokasi

penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, penulis memberikan gambaran secara detail mengenai fenomena yang terjadi di tempat penelitian tanpa mengalihkan perhatian dari tujuan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada, dan bukan fokus untuk menjerat orang atau kelompok tertentu. Penulis memilih metode kualitatif karena ingin menyelidiki secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai permasalahan yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di BPKPAD Kota Banjarmasin

Penulis mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Simangunsong 2017) menjelaskan bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna, sehingga makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dari ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi "topik penelitian yang subjektif dan *multiple*". Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sembilan orang informan yang terdiri dari Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Sub Bidang Penatausahaan BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis BPKPAD Kota Banjarmasin, dan tiga orang Operator SIPD BPKPAD Kota Banjarmasin. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin. Alasan penulis memilih informan yang akan diwawancarai selaras dengan penelitian yang menggunakan *teknik purposive sampling*, yakni karena informan memiliki kapabilitas dan keahlian di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mengoperasikan SIPD. Penelitian dilakukan selama tiga minggu yang bertempat di kantor BPKPAD Kota Banjarmasin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui SIPD di Kota Banjarmasin menemukan bahwa meskipun BPKPAD Kota Banjarmasin telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sebelas kali berturut-turut, penilaian SAKIP Kota Banjarmasin masih berada dalam kategori "Sangat Baik (BB)", bukan kategori "Memuaskan (A)". Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam hal efektivitas pelaporan, peningkatan komunikasi antarbidang, serta kecepatan respons terhadap permasalahan teknis SIPD. Kehadiran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diharapkan mampu menyeragamkan berbagai persepsi terkait pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah yang tepat kemudian dapat menjadi sarana yang menjembatani integrasi serta sinergi penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, inovatif dan berkualitas (Tumija et al., 2023). Kualitas sistem informasi adalah ukuran kualitas program dan fitur yang disediakan oleh sistem untuk memudahkan pengguna dalam mengolah informasi (Wihatmono, Suharman, dan Daryanto 2025).

Berdasarkan penelitian Ratna dan Nasrah (2016), pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penilaian SAKIP, dimana semakin baik pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik juga penerapan SAKIP. Mendukung hasil penelitian tersebut, Akbar et al (2016) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa implementasi SAKIP juga berpengaruh terhadap Good Governance yang menjadi tujuan dari pengelolaan keuangan daerah. Meskipun SAKIP tidak hanya menilai aspek

pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mencakup dimensi kinerja lainnya seperti perencanaan, pelaporan capaian kinerja, serta efektivitas program dan kegiatan, penulis secara khusus menyoroti aspek pengelolaan keuangan daerah sebagai fokus penelitian. Dari aspek ini, ditemukan bahwa masih kurangnya kerja sama dari SKPD, khususnya dalam hal keterlambatan pelaporan pergeseran anggaran, menjadi hambatan signifikan yang berdampak pada kelancaran proses input dan validasi data di SIPD serta menurunkan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah.

3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui SIPD di Kota Banjarmasin

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan pilar fundamental bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan berkeadilan. Akuntabilitas melampaui sekadar pertanggungjawaban finansial semata, tetapi kemudian mencakup dimensi yang lebih luas, meliputi transparansi yang maksimal, partisipasi aktif masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya, serta efektivitas dalam pencapaian tujuan. Konsep akuntabilitas, dirumuskan oleh Ellwood dalam Mardiasmo (2002), menawarkan kerangka analitis yang begitu komprehensif, untuk memahami kompleksitas akuntabilitas dalam pemerintahan, dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 pengukuran/indikator untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD, yaitu:

3.1.1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum menegaskan bahwa pejabat publik wajib menjalankan tugasnya dengan bersikap transparan, menghindari kecurangan serta setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat harus dapat selaras dengan ketentuan perundang-undangan dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, dan menjamin kepatuhan terhadap hukum. BPKPAD Kota Banjarmasin memegang erat komitmen untuk terwujudnya dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, dilakukan melalui penerapan kode etik dan perjanjian kinerja bagi seluruh pegawai guna optimalisasi penggunaan SIPD dimana seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilaksanakan transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mendorong pengelolaan anggaran yang profesional, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.1.2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas Proses menjamin bahwa setiap prosedur dalam pelaksanaan program dilaksanakan secara terbuka, terstruktur, sesuai dengan standar yang berlaku sehingga setiap tindakan dapat ditelusuri, dikaji ulang, dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas proses menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD, didukung SIA, SIM, memastikan prosedur administrasi lebih tertib dan efisien. Dengan adanya fitur proyeksi anggaran untuk SPM, SIPD membantu memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan rendah biaya terhadap masyarakat.

3.1.3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap efektivitas dan efisiensi program-program yang telah dirancang dan diimplementasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan kebijakan. SIPD telah mendukung akuntabilitas program dengan memastikan alokasi anggaran agar sesuai prioritas perencanaan daerah serta memungkinkan evaluasi berkala terhadap efektivitas program, sehingga penggunaan dana dapat diarahkan secara optimal.

3.1.4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan ialah adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik, termasuk kebijakan keuangan daerah, hal tersebut penting dalam memastikan kebijakan anggaran dan pengelolaan dana daerah dilakukan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran. BPKPAD Kota Banjarmasin memastikan akuntabilitas kebijakan melalui implementasi SIPD telah sesuai dengan regulasi. SIPD menjadi sistem utama yang terintegrasi dengan RPJMD, Renstra, RKPD, memastikan kebijakan anggaran selaras dengan prioritas pembangunan. Fitur-fitur seperti anggaran SPM dan kemiskinan ekstrem mendukung program-program strategis untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Meskipun tidak langsung melayani masyarakat, BPKPAD berperan dalam memastikan ketersediaan anggaran yang tepat dan efisien untuk SKPD lainnya dalam pelayanan publik.

3.2. Faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui SIPD di Kota Banjarmasin

Kendati penerapan SIPD telah membawa banyak keuntungan dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat berbagai faktor penghambat, yaitu:

3.2.1. Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal adalah faktor penghambat yang berasal dari dalam BPKPAD Kota Banjarmasin sendiri, yang terdiri dari:

3.2.1.1. Kurangnya Komunikasi yang Efektif Antar Bidang

Komunikasi yang efektif antar bidang adalah proses penyampaian informasi, instruksi antara berbagai bidang dalam suatu organisasi secara jelas, tepat, tanpa hambatan, sehingga dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. penerapan SIPD telah membawa peningkatan yang signifikan dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Kota Banjarmasin, tetapi masih terdapat kendala yang cukup menonjol, yaitu kurangnya komunikasi efektif antar bidang di BPKPAD yang terjadi karena sistem mengotomatisasi banyak proses, sehingga setiap bidang lebih fokus pada tugasnya masing-masing tanpa adanya koordinasi optimal. Akibatnya, dapat terjadi ketidaksesuaian data atau kendala teknis dalam penginputan dan pelaporan anggaran.

3.2.1.2. Lambatnya Pengambilan Keputusan karena Memerlukan Banyak Pertimbangan

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak boleh dilakukan secara sembarangan sehingga harus melewati berbagai tingkat birokrasi dan persetujuan dari berbagai pihak. Meskipun bertujuan untuk memastikan ketepatan dan transparansi, keterlambatan dalam proses ini dapat menghambat efisiensi, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, seperti perubahan mendadak dalam alokasi anggaran akibat kondisi darurat. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di BPKPAD Kota Banjarmasin masih menghadapi kendala utama berupa waktu yang lama karena banyaknya tahapan pertimbangan dan validasi yang harus dilalui. Selain itu, karena data dalam SIPD bersifat terintegrasi, setiap perubahan harus dikaji dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku, sehingga menambah durasi proses pengambilan keputusan.

3.2.1.3. Aplikasi SIPD RI yang Sering Error

Error aplikasi dapat diartikan sebagai kondisi saat sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya karena gangguan teknis, baik dari sisi perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*), atau dari sisi jaringan/server pusat. Seringnya terjadi kesalahan atau error dalam aplikasi SIPD RI yang meliputi lambatnya akses dalam sistem, gagal melakukan login sehingga harus menghapus riwayat sampah terlebih dahulu, serta error dalam input SHS. Permasalahan tersebut yang menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah, padahal dalam prosesnya terdapat tenggat waktu yang ketat dan tidak dapat dilampaui.

3.2.2. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal adalah faktor penghambat yang berasal dari luar BPKPAD Kota Banjarmasin, yang terdiri dari:

3.2.2.1. Lambatnya Penanganan Kendala SIPD oleh Tim *Helpdesk* Kemendagri

Helpdesk merupakan layanan dukungan teknis yang berfungsi memberikan bantuan, jawaban, atau solusi atas kendala yang dihadapi oleh pengguna, khususnya dalam pengoperasian sistem atau aplikasi tertentu. Proses pelaporan kendala yang harus melalui mekanisme pusat sering kali memakan waktu yang lama, sehingga menghambat kelancaran operasional SIPD. Keterbatasan akses untuk melakukan perbaikan secara mandiri di daerah menyebabkan kesalahan input dalam penyusunan anggaran maupun laporan keuangan sulit untuk segera diperbaiki, mengakibatkan ketidaksesuaian data dan menurunkan akuntabilitas keuangan daerah secara keseluruhan.

3.2.2.2. Kurangnya Kesadaran atau Dukungan dari Pengguna SIPD Yaitu SKPD

Perubahan anggaran di lingkup SKPD tidak segera dilaporkan ke BPKPAD Kota Banjarmasin untuk segera diverifikasi, sehingga dapat menyebabkan data yang masuk ke sistem menjadi tidak akurat. Laporan yang sudah melewati tahap verifikasi dan dikirim ke pusat, perubahan datanya menjadi lebih sulit karena harus melalui Tim *Helpdesk* Kemendagri, yang proses penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup lama. Keterlambatan ini menyebabkan ketidaksesuaian data, yang berdampak pada pelaksanaan program daerah, sekaligus mengurangi fleksibilitas dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang berkembang. Selain itu, hal ini turut memengaruhi penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3.3. Upaya BPKPAD Kota Banjarmasin dalam Mengatasi Faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui SIPD di Kota Banjarmasin

BPKPAD Kota Banjarmasin tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penggerak solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi. Berikut berbagai upaya strategis yang dilakukan BPKPAD Kota Banjarmasin dalam mengatasi faktor-faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.

3.3.1. Upaya Langsung

Upaya langsung ialah langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh BPKPAD Kota Banjarmasin untuk mengatasi faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD, yang meliputi:

3.3.1.1. Meningkatkan Komunikasi Antar Bidang

BPKPAD Kota Banjarmasin telah membentuk Tim Koordinasi Lintas Bidang, sebagai wadah koordinatif untuk merespons permasalahan SIPD yang mengadakan rapat evaluasi rutin secara tatap muka ataupun daring, memanfaatkan grup WhatsApp dan Telegram untuk diskusi cepat, serta menyampaikan kendala langsung tanpa harus menunggu pertemuan formal.

3.3.1.2. Mempercepat Proses Pengambilan Keputusan

Mengatasi lambatnya proses pengambilan keputusan, diterapkan berbagai strategi percepatan dengan memprioritaskan keputusan yang mendesak dengan tenggat waktu paling dekat, menyederhanakan mekanisme keputusan, serta menetapkan batas waktu maksimal di setiap tingkat pengambilan keputusan.

3.3.1.3. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Pegawai BPKPAD dan Input Data di Malam Hari

Kendati proses input data SIPD sering kali dilakukan di luar jam kerja karena keterbatasan akses *server*, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga karena didukung oleh bimtek bagi pegawai meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengoperasikan SIPD dengan cepat, tepat, dan akurat dalam mengatasi tekanan berupa tenggat waktu penginputan data anggaran dan pelaporan yang terbatas, serta seringnya terjadi error teknis dalam sistem SIPD yang dapat menghambat kelancaran kerja.

3.3.2. Upaya Tidak Langsung

Upaya tidak langsung ialah serangkaian langkah strategis bersifat jangka panjang, dirancang untuk membangun dan memperkuat ekosistem tata kelola keuangan daerah transparan, efisien, akuntabel melalui SIPD.

3.3.2.1 Mengajukan Sistem Prioritas untuk Pelaporan Masalah ke *Helpdesk*, Penambahan Akun *Helpdesk* untuk Setiap Provinsi, dan Peningkatan Kapasitas *Server*

BPKPAD telah menyampaikan usulan kepada Kemendagri, jika pembentukan *homebase* atau kantor *helpdesk* di tiap kabupaten/kota atau provinsi sulit direalisasikan karena alasan pengawasan dan potensi penyalahgunaan wewenang juga keterbatasan anggaran, solusi alternatif seperti

penyediaan unit *helpdesk* untuk masing-masing provinsi dapat menjadi langkah yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Pengelompokan pelaporan sesuai dengan tingkat urgensi dapat membantu memastikan kendala yang bersifat kritis dapat ditangani lebih cepat. Peningkatan kapasitas server juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Kemendagri agar tidak terjadi *error* yang seringkali menghambat proses pengelolaan keuangan daerah.

3.3.2.2 Melakukan Sosialisasi kepada SKPD untuk Tertib Melaporkan Pergeseran Anggaran

BPKPAD Kota Banjarmasin sebagai lembaga yang mengintegrasikan data keuangan dari seluruh SKPD, berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan SKPD dengan melakukan sosialisasi agar SKPD tertib dan disiplin dalam pelaporan pergeseran anggaran karena satu saja kekeliruan dapat berdampak signifikan pada keseluruhan data yang diproses, yang berpotensi mengganggu akurasi analisis keuangan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini secara signifikan memperluas dan memperdalam cakupan kajian mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui pendekatan langsung terhadap implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKPAD Kota Banjarmasin. Berbeda dari pendekatan yang diambil oleh Dewata, Jauhari, dan El Auda (2021), yang lebih menitikberatkan pada peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas melalui peningkatan kualitas laporan keuangan, penelitian ini tidak hanya mengkaji dari sisi sistem pengendalian internal semata, melainkan juga menambahkan dimensi praktis yang kuat dengan mengamati langsung pelaksanaan SIPD di lapangan, termasuk mengidentifikasi berbagai hambatan teknis yang muncul serta merumuskan solusi yang relevan dan dapat diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap proses implementasi SIPD, khususnya dalam hal bagaimana sistem ini digunakan oleh aparatur daerah dan bagaimana interaksi antar pengguna memengaruhi kelancaran pelaporan dan pengelolaan anggaran.

Temuan dalam penelitian ini juga memiliki kesinambungan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Vidyasari dan Suryono (2021), yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menyoroti berbagai faktor penghambat aktual yang terjadi dalam proses digitalisasi sistem pelaporan dan penganggaran menggunakan SIPD, yang sejauh ini belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Beberapa kendala nyata yang teridentifikasi mencakup keterlambatan dalam penginputan data, kurangnya pemahaman teknis dari aparatur pelaksana, hingga kendala sistemik seperti gangguan server dan error pada aplikasi.

Penelitian ini juga menguatkan temuan dari Aulia dkk (2024) yang menyoroti bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih menjadi tantangan signifikan di Kabupaten Deli Serdang. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemberian alternatif solusi yang konkret dan realistis, seperti penyusunan template laporan secara offline untuk mengatasi keterbatasan teknis, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan kepada pengguna SIPD, hingga peningkatan koordinasi antarbidang guna mempercepat proses pelaporan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan dari Luqyana dan Islahuddin (2022) yang meneliti pengaruh aksesibilitas, sistem pengendalian internal, dan kompetensi aparatur

terhadap tingkat akuntabilitas. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut dengan mencatat pentingnya peningkatan kapasitas pegawai, khususnya di lingkungan BPKPAD, melalui program bimbingan teknis yang terstruktur serta perlunya sinergi dan komunikasi lintas bidang dalam rangka memperlancar proses pengelolaan keuangan dan meminimalisasi kesalahan dalam penginputan dan pelaporan anggaran.

Menariknya, konteks penelitian ini juga menunjukkan kedekatan dengan studi yang dilakukan oleh Tumija dkk (2023), yang membahas penerapan SIPD di Kota Semarang dan menemukan sejumlah hambatan seperti gangguan sistem serta lemahnya dukungan server. Temuan serupa juga muncul di Kota Banjarmasin, dan penelitian ini mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk mengatasinya, seperti menganjurkan penginputan data di luar jam sibuk guna mengurangi beban server serta memperkuat sistem pelaporan gangguan melalui helpdesk pusat agar respon terhadap kendala teknis lebih cepat dan terorganisir. Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berhasil mengonfirmasi berbagai temuan dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga memperluas kajian yang ada dengan menghadirkan dimensi praktis, teknis, dan operasional yang lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian ini memberikan kontribusi berarti dalam menyusun strategi penyelesaian yang aplikatif dan relevan dengan kondisi riil di daerah, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan SIPD guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di BPKPAD Kota Banjarmasin secara umum telah diwujudkan karena telah sesuai dengan Teori Akuntabilitas oleh Ellwood dalam Mardiasmo (2002). Terdapat faktor penghambat internal serta eksternal dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD, yakni terdapat beberapa faktor penghambat, internal meliputi kurangnya komunikasi yang efektif antar bidang, proses pengambilan keputusan yang lambat karena memerlukan banyak pertimbangan, dan Aplikasi SIPD RI yang sering error. Adapun faktor penghambat eksternal meliputi lambatnya penanganan atas kendala SIPD oleh Tim Helpdesk Kemendagri dan kurangnya kesadaran atau dukungan dari pengguna SIPD yaitu SKPD. Beragam upaya yang dilakukan oleh BPKPAD Kota Banjarmasin dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah upaya langsung dengan meningkatkan komunikasi antar bidang, mempercepat proses pengambilan keputusan, melakukan bimbingan teknis kepada pegawai BPKPAD Kota Banjarmasin dan *input* data di malam hari. Upaya tidak langsung dengan mengajukan sistem prioritas untuk pelaporan masalah ke *helpdesk*, penambahan akun *helpdesk* untuk setiap provinsi, dan peningkatan kapasitas *server* serta melakukan sosialisasi kepada SKPD agar tidak ada lagi SKPD yang lalai dalam melaporkan pergeseran anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni pada hanya lingkup BPKPAD Kota Banjarmasin dan belum mencakup SKPD lain secara menyeluruh, sehingga gambaran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD belum sepenuhnya holistik. Penelitian juga dilakukan dalam periode tertentu, sehingga belum menangkap dinamika jangka panjang dan pembaruan sistem SIPD.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini memberikan pijakan awal untuk mengkaji lebih dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berbasis digital melalui SIPD. Di masa mendatang, arah penelitian dapat dikembangkan ke ranah yang lebih luas, yakni dapat mengkaji sejauh mana SIPD mampu mendorong transparansi dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, serta mengidentifikasi pengembangan indikator pengukuran kepuasan pengguna SIPD, baik dari sisi internal pemerintah maupun masyarakat umum, juga penting untuk menyempurnakan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengambilan kebijakan strategis dan perbaikan sistem yang berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin beserta jajarannya, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian, serta atas kerjasama, dukungan, kesempatan, dan kontribusi yang luar biasa dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan bantuan dari pihak BPKPAD Kota Banjarmasin, penelitian ini tidak akan terwujud.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Akbar, D. & Nurdian. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 4(01), 10-27. <http://dx.doi.org/10.25157/.v4i1.3394>.
- Aulia, Y., Dkk. 2024. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>.
- Dewata, E., Jauhari, H., & El Auda, M. (2021). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 44–53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5747284>.
- Luqyana & Islahuddin. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Apakah Aksesibilitas, Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Aparatur Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 83–94. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i1.21068>.
- Jatmiko, Bambang, Dadang Irawan, Zaky Machmuddah, and Titi Laras. 2020. “Factors Affecting Regional Government Financial Statements: Evidence from Indonesia.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9(2):89. doi: 10.36941/ajis-2020-0026.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nurdin, I., & Hartati, S. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.
- Ratna, I. & Nasrah, H. (2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 19(1). <http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v19i1.2504>
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Cet.1*. Bandung: Alfabeta.

- Sinurat, M., Dkk. 2023. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3417>.
- Tumija & Erlambang, P. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>.
- , Asep Hendra, and Dkk. 2023. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi* 5(1):79–91. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>.
- Vidyasari, F., Suryono, B. 2021. PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4).
- Wihatmono, Shantyo Raharjo, Harry Suharman, and Daryanto. 2025. “The Influence of Organizational Culture on the Government Internal Control System And Its Impact on the Quality of Financial Information Systems in the Regional Revenue Agency of West Java Province.” *Journal of Ecohumanism* 4(1). doi: 10.62754/joe.v4i1.6004.
- Yuesti, Anik, I. Made Dwi Adnyana, and I. Gusti Ayu Asri Pramesti. 2022. “Management Information Systems and the Quality of Financial Statements in Local Government.” *Journal of Public Affairs* 22(3). <https://doi.org/10.1002/pa.2462>.

